

Dr. Paisol Burlian, S.Ag., M.Hum.



Sistem Hukum di Indonesia





SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Dr. Paisol Burlian, S.Ag, M.Hum

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
2015**

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Tim Peneliti : Dr. Paisol Burlian, S.Ag, M.Hum
Layout : Haryono
Desain Cover : Haryono

Diterbitkan oleh

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah

Dicetak Oleh: NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN RF

NoerFikri Offset

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142
Telp/Fax : 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : November 2015

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-602-7388-44-4

KATA PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kudrat, iradat, rahmat dan RidhaNya, saat ini kami bisa menyelesaikan buku yang berjudul “Sistem Hukum di Indonesia”.

Buku ini disusun berdasarkan fakta dan pengalaman mengampuh mata kuliah Sistem Hukum di Indonesia dengan menggunakan beberapa referensi dari para pakar Hukum Tata Negara yang telah populer dan mempunyai standar akademik yang tak perlu diragukan di ranah tata Negara, baik tingkat nasional maupun manca negara. Buku ini disusun untuk memenuhi usulan-usulan/saran-saran dari mahasiswa mata kuliah “Sistem Hukum di Indonesia” di Perguruan tinggi di Indonesia, diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai apa itu Sistem Hukum di Indonesia bisa menjadi sistem filsafat dan pedoman bagi orang berkecimpung dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku ini masih ditemukan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifatnya membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Semoga buku ini bisa memberikan informasi mengenai Sistem Hukum di Indonesia dan bermanfaat bagi para pembacanya. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan untuk membaca buku ini kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 12 September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HAKIKAT DAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

2.1. Defenisi, Mazhab, Tujuan dan Fungsi Hukum Indonesia	11
2.1.1. Defenisi sistem dan hakikat hokum	12
2.2. Tujuan dan Fungsi Hukum	15
2.2.1. Tujuan Hukum	15
2.2.2. Fungsi Hukum	17

BAB III MAZHAB HUKUM

3.1. Mazhab-mazhab (Aliran) dalam Hukum	19
3.3.1. Pengertian Teori dan Aliran Hukum	20
3.3.2. Pembagian Teori Hukum	20
3.3.3. Aliran Positivisme Hukum	22

BAB IV KARAKTERISTIK (POSITIF DAN PROGRESIF) DAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA

4.1. Karakteristik Hukum di Indonesia	25
4.2. Karakteristik hukum bersumber Pancasila dan UUD 1945	26
4.3. Politik Hukum	29
4.4. Penerapan Politik Hukum di Indonesia	32

BAB V PLURALISME HUKUM DI INDONESIA

5.1. Pendahuluan	37
5.2. Pluralisme Hukum	37
5.3. Pluralisme Hukum di Indonesia	38
5.4. Gerakan Pluralisme Hukum di Indonesia	39
5.5. Relevansi Pluralisme Hukum bagi Indonesia Sekarang Ini	41

BAB VI. KAIDAH DASAR PEMBENTUKAN HUKUM DAN SUMBER-SUMBER HUKUM DI INDONESIA

6.1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa	43
6.2. Pancasila Sebagai Dasar Negara	44
6.3. Pengertian Istilah Pancasila	45
6.4. Perumusan- Perumusan Pancasila	45
6.5. Lahirnya Pancasila	46
6.6. Pengertian Dasar Negara	47
6.7. Pancasila Sebagai Dasar Negara	47

BAB VII KAIDAH PANCASILA, PERAN DAN FUNGSI SUMBER HUKUM

7.1. Pendahuluan	53
7.2. Pengertian Pancasila	55
7.3. Fungsi dan Peranan Pancasila	57
7.4. Makna Sila-Sila Pancasila	63
7.5. Sikap Positif terhadap Nilai-nilai Pancasila	65

BAB VIII PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM INDONESIA

8.1. Pendahuluan	67
8.2. Sistem Hukum Indonesia	69

8.3. Perubahan Sistem Hukum Indonesia	71
8.4. Perkembangan Sistem Hukum Indonesia berdasarkan pemikiran Filsuf Hukum	72
8.5. Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pemikiran Filsuf Roscoe Pound	75

BAB IX. PERANAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI HUKUM PADA MASING- MASING PERIODE

9.1. Peran Pemerintah	79
9.2. Fungsi Pemerintahan	81
9.3. Defenisi Politik	83
9.4. Hubungan Politik dengan Hukum	85
9.5. Hubungan Politik Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	86
9.6. Pembenahan Sistem Politik Hukum	
9.7. Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	88
9.8. Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	91
9.9. Peran Politik Hukum dalam Penegakan Hukum	92
9.9.1. Peran Aparatur Penegak Hukum	96

BAB IX. KOMPONEN SUBSTANSI HUKUM

10.1. Sistem Hukum Adat dan Hukum Perdata	99
10.2. Hukum Adat	106
10.3. Asas asas, Sifat dan Corak Hukum Adat	112
10.4. Perkembangan Hukum Adat: Paradigma Teori	115
10.5. Hukum Adat Perkembangan Dalam Hukum Positive Di Indonesia	117

10.6. Perkembangan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi Indonesia	129
--	-----

BAB XI. SISTEM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

11.1. Pendahuluan	137
11.2. Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia	137
11.3. Sejarah Singkat Terjadinya Hukum Perdata	140
11.4. Sistematika Hukum Perdata di Indonesia	143

BAB XII. SISTEM HUKUM PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

12.1. Pendahuluan	145
12.2. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia	145
12.3. Acara Persidangan Pidana	148
12.4. Proses Pelaksanaan Sanksi Pidana	154

BAB XIII. SUBSTANSI HUKUM POSITIF INDONESIA

13.1. Sistem Hukum Tata Negara Indonesia dan Sistem Hukum Administrasi Negara	157
13.2. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia	158
13.3. Sistem Pemerintahan di Indonesia	159
13.4. Ruang Lingkup Kajian HTN.	160
13.5. HTN Hubungannya Dengan Ilmu Lainnya	162
13.6. Sumber Hukum Tata Negara	163
13.7. Hirarkhi Perundang Undangan	166
13.8. Pengertian Asas HTN	168
13.9. Lembaga –Lembaga Negara Menurut UUD 1945	169
13.9. Good Governance	171
13. 10. Hukum Administrasi Negara	173

13.10. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana	175
---	-----

BAB XIV. SISTEM HUKUM INTERNASIONAL

14.1. Sistem Hukum Internasional	179
14.2. Pengertian Hukum Internasional	179
14.3. Pengertian Peradilan Internasional.....	180
14.4. Asal Mula Hukum Internasional	180
14.5. Pembagian Hukum Internasional	181
14.6. Asas-asas Hukum Internasional	182
14.6. Sumber Hukum Internasional	184
14.7. Subjek Hukum Internasional	184
14.8. Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional	188
14.9. Lembaga Peradilan Internasional	189
14.10. Proses Ratifikasi Hukum Internasional Menjadi Hukum Nasional	192
14.11. Proses Hukum yang Adil atau Layak	195

BAB XV. KEKUASAAN BADAN-BADAN PERADILAN DI INDONESIA

15.1. Kekuasaan Kehakiman	197
15.2. Kekuasaan Mengadili	198
15.3. Kekuasaan Kehakiman Setelah UUPKK (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan KUHAP	199
15.4. Penafsiran, Penggolongan dan Klasifikasi Hukum	201

BAB XVI. UNSUR-UNSUR BANGUNAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

16.1. Pengertian Sistem Hukum	207
16.2. Sistem Hukum di Indonesia	207

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

Sistem Hukum Indonesia merupakan hal yang telah menjadi wacana berkelanjutan, yang tidak hanya melibatkan ahli dan pemerhati hukum, tetapi juga telah menarik ke dalamnya berbagai kalangan untuk ikut menyampaikan pendapat. Ini merupakan sesuatu yang dapat dimengerti mengingat dalam kenyataannya hampir tidak ada celah kehidupan yang tidak 'diintervensi' norma hukum.

Slogan-slogan *Ubi Sociates Ibi Ius*, *Fiat Iustitia Ruat Caelum*, dan lain-lainya menegaskan bahwa dalam masyarakat yang paling sederhana sekalipun keberadaan norma hukum sebagai suatu pranata sosial secara nyata telah menjadi *qonditio sine quanon* bagi keberlangsungan masyarakat tersebut sebagai suatu entitas. Namun demikian, apakah itu berarti hukum yang ada di suatu masyarakat telah menjadi sesuatu yang sistemik, dengan kata lain apakah hukum yang ada pada masyarakat tersebut telah terbangun menjadi sistem hukum? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu harus dipastikan dulu apa yang dimaksud sebagai sistem hukum, untuk dapat dijadikan tolok ukur, karena mungkin saja yang terdapat pada suatu masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berserakan, yang tidak saling berhubungan, atau sekalipun berhubungan tidak saling mendukung, justru saling melemahkan.

Berdasarkan pendapat Ludwig von Bertalanffy, H. Thierry, William A. Shorke/Voich Jr., sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustofa¹ menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem hukum adalah sistem sebagai jenis satuan yang dibangun

¹Bachsan Mustafa, 2003. *Sistem Hukum Indonesia terpadu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 5-6.

dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan. Sistem hukum terdiri dari komponen jiwa bangsa, komponen struktural, komponen substansial, dan komponen budaya hukum.

Suherman tidak sependapat jika pengertian sistem hukum hanya penggabungan istilah sistem dan hukum². Menurutnya pengertian spesifik dalam hukum harus tercermin dari istilah sistem hukum. Suherman mengemukakan pendapat J.H. Merryman sebagai perbandingan. Menurutnya sistem hukum adalah suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, atau aturan, dalam konteks ini ada suatu negara federal dengan lima puluh sistem hukum di Amerika Serikat, adanya sistem hukum setiap bangsa secara terpisah, serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi Masyarakat Ekonomi Eropah dan Perserikatan Bangsa-bangsa.

Bagaimanapun juga, sebagaimana dikutip oleh Amirin³ sebagai suatu sistem, sistem hukum seharusnya: terdiri dari bagian-bagian, bagian-bagian tersebut saling berhubungan, masing-masing bagian dapat dibedakan tetapi saling mendukung, semuanya ditujukan pada tujuan yang sama, dan berada dalam lingkungan yang kompleks (pendapat ini dihubungkan dengan pendapat Shrode dan Voich.

Untuk komponen sistem hukum, pendapat yang sering dijadikan rujukan adalah apa yang dikemukakan oleh Friedman (selain Mustofa dan Suherman, juga Acmad Ali⁴, yang

²Ade Maman Suherman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 10-11

³ Tatang M. Amirin, 1987. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: CV. Rajawali, hlm.11

⁴Achmad Ali, 2002. *Keterpurukan Hukum Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

menyatakan bahwa sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.

Ada pendapat bahwa hukum Indonesia, dengan segala keterbatasannya, telah terbangun menjadi suatu sistem. Norma hukum Indonesia, ada yang telah lebih teruji oleh waktu lebih dari seabad, melewati berbagai dinamika masyarakat dan sampai saat ini masih berlaku. Sejak pendidikan hukum dilakukan secara formal di Indonesia, sistem hukum Indonesia telah menjadi bahan kajian. Hampir tidak ada yang menyerukan agar dilakukan 'revolusi'⁵ dalam hukum, yang banyak diserukan adalah reformasi dalam bidang-bidang hukum tertentu. Dengan demikian krisis hukum yang sering disebut-sebut, boleh jadi bukan krisis dalam sistem hukum secara keseluruhan, tetapi krisis dalam penegakan hukum.

Sebagai suatu sistem, bagaimanakah gambaran umum Sistem Hukum Indonesia?⁶ Dalam kajian-kajian teoretik, berdasarkan berbagai karakteristik sistem hukum dunia dibedakan antara: sistem hukum sipil; Sistem hukum *anglo saxon* atau dikenal juga dengan *common law*; hukum agama; hukum negara blok timur(sosialis). Sebagaimana dikutip Suherman⁷ bahwa Eric L. Richard membedakan sistem hukum yang utama di dunia(*TheWorld's Major Legal Systems*) menjadi: *civil law*; *common law*; *Islamic law*; *socialist law*; *sub-Sahara Africa*; dan *Far East*. Munir Fuady⁸ menyatakan terdapat lebih dari 11 pengelompokan sistem

⁵Revolusi dalam hukum ditandai dengan penggantian hukum secara fundamental, dihubungkan dengan teori Hans Kelsen ditandai dengan runtuhnya *grund norm* dari suatu sistem hukum.

⁶Belum banyak yang menggunakan istilah hukum nasional, hal ini dapat dihubungkan dengan masih banyaknya peraturan hukum warisan zaman kolonial.

⁷ Ade Maman Suherman, *op-cit*, hlm. 21

⁸ Munir Fuady, 2007. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, hlm.32

hukum⁹. Menurutya tradisi hukum dunia dibedakan antara: tradisi hukum Eropah Kontinental, tradisi hukum Anglo Saxon, tradisi hukum sosialis, tradisi hukum kedaerahan, tradisi hukum keagamaan.

Di antara sistem-sistem hukum yang dikenal, sistem hukum Eropah Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon banyak dipakai dan cenderung berpengaruh terhadap sistem hukum yang dianut negara-negara di dunia. Sistem hukum Eropa Kontinental dikenal juga dengan sebutan *Romano-Germanic Legal System* adalah sistem hukum yang semula berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis, berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar bagi putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon).

Sistem Hukum Adat dinyatakan dianut oleh beberapa negara di antaranya oleh Mongolia dan Srilangka (ada juga yang mengkategorikan Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum adat). Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu, yang umumnya terdapat dalam Kitab Suci. Arab Saudi, Iran, Sudan, Suriah, dan Vatikan

⁹ Munir Fuady lebih banyak menggunakan istilah tradisi hukum. *Ibid.*

dikategorikan sebagai negara dengan sistem hukum agama. Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

Secara umum antara Sistem Hukum Eropa Kontinental dengan Sistem Hukum Anglo Saxon dibedakan berdasarkan mana yang dipentingkan dalam pembentukan dan penegakkan hukum, melalui peraturan perundang-undangan atau melalui jurisprudensi, secara lebih mendasar mana yang lebih dipentingkan hukum tertulis atau hukum kebiasaan. Mengingat kekurangan dan kelebihan antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, maka secara filosofis hal ini berhubungan dengan masalah pengutamaan antara kepastian dan keadilan, yang meskipun sama-sama merupakan nilai dasar hukum tetapi antara keduanya terdapat *spannungsverhältnis* (ketegangan satu sama lain).

Sistem Hukum Eropa Kontinental lebih mengedapankan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan menduduki tempat penting. Peraturan perundang-undangan yang baik, selain menjamin adanya kepastian hukum, yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, juga dapat diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Lembaga peradilan harus mengacu pada undang-undang. Sifat undang-undang tertulis yang statis diharapkan dapat lebih fleksibel dengan sistem bertingkat dari norma dasar sampai norma yang bersifat teknis, serta dengan menyediakan adanya mekanisme perubahan undang-undang.

Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap

lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

Apapun sistem hukum yang dianut, pada dasarnya tidak ada negara yang hanya didasarkan pada hukum tertulis atau hukum kebiasaan saja. Tidak ada negara yang sistem hukumnya menafikan pentingnya undang-undang dan pentingnya pengadilan.

Kompleksitas sistem hukum Indonesia dibentuk oleh perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. Pertama kali kebudayaan yang muncul adalah kebudayaan Indonesia asli. Sebagai produk kebudayaan asli ini adalah hukum adat. Kebudayaan ini berlangsung sebelum kedatangan kebudayaan India (Hindu). Selanjutnya Indonesia memasuki masa pengaruh kebudayaan Hindu. Pada abad ke-13 sampai ke-14 masuk pengaruh Islam, dan hukum Islam berkembang dan memperkaya sistem hukum yang ada di Indonesia. Baru pada abad ke-17 masuk kebudayaan Eropa-Amerika.

Jika hukum adat yang ada di Indonesia, dihubungkan dengan corak dasar kedua sistem hukum yang paling berpengaruh (Eropah Kontinental dan Anglo Saxon), cenderung lebih dekat dengan sistem Anglo Saxon. Hukum adat terbangun dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu, yang kemudian oleh masyarakat ditempatkan lebih dari sekadar norma kesopanan atau kesusilaan menjadi norma hukum (*opinio juris sive necessitatis*). Masyarakat tradisional Indonesia yang bercorak patriarkhis, menempatkan tetua-tetua/pemuka-pemuka adat sebagai tokoh penting yang menentukan hukum jika masyarakat menghadapi suatu persoalan. Meskipun tidak ketat mengikat, apa yang diputuskan akan diikuti jika terjadi lagi hal serupa. Jadi Mirip dengan sistem preseden. Peran tetua/tokoh/ ketua suku menjadi sangat penting dalam membentuk

hukum, sehingga dapat dipahami jika yang dipilih seharusnya yang paling berpengetahuan dan bijak.

Pada masa kolonial Belanda, dengan penerapan asas konkordansi, maka hukum yang berlaku di Hindia Belanda sejalan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Belanda merupakan salah satu pendukung terkemuka sistem hukum Eropah Kontinental. Dengan demikian, secara *mutatis mutandis* sistem Eropah Kontinental dilaksanakan di Indonesia. Walaupun demikian pada dasarnya Belanda menganut politik hukum adat (*adatrechtspolitik*) yang membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian pada masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Dengan adanya lembaga penundukan diri secara sukarela, banyak penduduk Indonesia saat itu menundukan diri untuk terikat pada Hukum Barat, terutama yang berusaha di bidang perdagangan. Dalam perkembangan hukum di Indonesia selanjutnya, tampak kuatnya pengaruh hukum kolonial dan cenderung meninggalkan hukum adat¹⁰.

Setelah kemerdekaan, pengaruh Sistem Eropah Kontinental tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi. Meskipun Hukum Adat tetap diakui, tetapi pandangan yang lebih mengemuka adalah dalam pembangunan hukum maupun optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Ajaran yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat beberapa waktu sebelumnya, yaitu Mazhab Sejarah yang dipelopori oleh Von Savigny dan teori keputusan yang dikemukakan oleh Ter Haar, dianggap tidak relevan.

¹⁰Daniel S. Lev, 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3S, hlm.438-473.

Mazhab sejarah menyatakan bahwa hukum itu *hinkt achter de feiten aan*, hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh secara historis atas dasar peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Teori keputusan menyatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh penguasalah yang merupakan hukum. Kedua mazhab ini menyatakan bahwa hukum hanya menyangkut kejadian yang sudah sering terjadi. Kedua paham ini dianggap tidak sejalan dengan pembangunan yang identik dengan perubahan, dengan kemungkinan terjadinya hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dari sudut pandang ini inilah kedua mazhab ini dianggap tidak relevan.¹¹

Dalam perkembangannya kemudian, sebagai dampak pergaulan Indonesia dalam kancah internasional, munculah bidang-bidang hukum baru seperti *corporate law*, *computer law*, *cyber law*, dan sebagainya. Kebijakan dalam bidang-bidang ini dan kebijakan-kebijakan global lainnya, legitimasinya banyak mengacu pada Sistem *Common law*.

Pemberian wewenang yang lebih luas kepada Pengadilan Agama, tidak hanya sekadar menangani nikah, talak, rujuk, juga membuat pengaruh Hukum Islam bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam semakin luas, setelah sebelumnya memberikan warna bagi Hukum Adat di beberapa tempat di Indonesia.

Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional.

¹¹Sunarjati Hartono, 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, hlm. 46

Tidak hanya unik, sistem hukum Indonesia adalah sistem yang masih penuh dengan dinamika, untuk mencari format di mana keteraturan dan keteraturan hukum sipil mendapat tempat, dengan tidak mengesampingkan keluwesan hukum Anglo Saxon, serta tidak menghilangkan suasana kebatinan masyarakat Indonesia.

Pencermatan terhadap kondisi nyata sistem Hukum Indonesia dan Sistem Hukum yang dicita-citakan seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan hukum, termasuk dalam pembangunan pendidikan hukum. Legislator yang handal dan Juris yang berkemampuan sama-sama diperlukan. Tetapi, ahli mana yang jumlahnya lebih banyak dibutuhkan, keahlian apa yang lebih banyak diperlukan tentu berbeda.

Komitmen untuk menegakkan supremasi hukum selalu didengungkan, tetapi keberadaan hukum maupun sistem hukum bukanlah merupakan ciri mendasar dari supremasi hukum. Supremasi hukum ditandai dengan penegakan *rule of law* yang sesuai dengan, dan yang membawa keadilan sosial bagi masyarakat. Jadi yang terutama dan diutamakan adalah hukum dan sistem hukum yang membawa keadilan bagi masyarakat.